



# Buletin Parlementaria

Nomor 1036/I/XII/2018 • Desember 2018



## DPR Luncurkan Aplikasi *E-Arsip* dan *E-Library*



Press Gathering Tingkatkan Silaturahmi DPR dan Wartawan



Foto: Kresno

Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto didampingi Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar (tengah) menyerahkan 203 boks arsip DPR RI kepada ANRI

## DPR Luncurkan Aplikasi *E-Arsip* dan *E-Library*

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meluncurkan aplikasi *E-Arsip* dan *E-Library* atau yang disebut dengan SiAr dan SiPerpus dalam acara Pameran Arsip dan Perpustakaan Pusat Data dan Informasi Setjen dan BK DPR RI “DPR Dari Masa Ke Masa”. Dalam pameran tersebut, DPR RI juga menyerahkan 203 boks arsip DPR RI kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Arsip ini diserahkan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Utut Adianto didampingi Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar, dan diterima langsung oleh Sekretaris

Utama (Sestama) ANRI Sumrahadi, dan Kepala Perpustakaan Nasional Indonesia (Perpusnas) Syarif Bando, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (27/11).

“Saya sangat senang dengan penyerahan 203 boks arsip yang diserahkan kepada ANRI. Ini menunjukkan Kesetjengan DPR RI tidak larut dalam euforia yang *hip hop*, euforia yang sifatnya kekinian. Menyerahkan data ke arsip nasional itu merupakan sebuah langkah strategis. Untuk memasukkan dalam boks atau kardus saja itu tidak mudah, jadi saya sangat mengapresiasi acara ini,” puji Pimpinan Koordinator Bidang Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) dan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) ini.



Arsip di DPR RI ini, lanjut Utut, merupakan hal-hal yang bersejarah, hal yang bersifat produk masa lampau yang jika diikuti jalannya sangat panjang. Debat-debat di DPR RI tidak sekedar debat, namun ada nuansa politik di dalamnya. Ada keberpihakan fraksi-fraksi dan dinamika politik yang bisa dilihat di sana.

“Saya salut dengan Kesetjenan DPR RI. Kepada teman-teman di ANRI, jika arsip tersebut kelak ada yang diperlukan, maka kami bisa meminjamnya. Karena lembaga ini merupakan lembaga politik. Saat ini kita benar, tapi belum tentu nanti. Jika ada masalah di kemudian hari, maka arsip-arsip itulah yang akan jadi bukti benar tidaknya,” tambah legislator PDI-Perjuangan itu.

Utut meyakini, bahwa di tangan ANRI, arsip-arsip DPR RI akan terjaga dan tersusun dengan baik dan rapi. Lebih lanjut legislator dapil Jateng VII ini berharap agar arsip-arsip tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat terutama pelajar agar mengetahui perjalanan dan tugas serta kinerja DPR RI selama ini, yang sekaligus sebagai sebuah bagian dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menilai peluncuran aplikasi *E-Arsip* dan *E-Library* ini merupakan satu bentuk konsekuensi dari dicanangkannya Parlemen modern beberapa bulan silam. Parlemen modern yang merupakan parlemen terbuka yang memudahkan masyarakat dalam mengakses seluruh informasi dan segala sesuatu tentang DPR RI.

“Mulai dari tugas-tugas DPR RI, kinerja yang tengah dilaksanakan DPR RI hingga produk yang telah dihasilkan oleh DPR RI sebagai lembaga legislatif. Dengan kata lain, meski secara fisik tidak seluruh masyarakat bisa datang ke DPR RI, namun dengan teknologi mereka masih tetap bisa mengakses informasi tersebut, untuk berbagai keperluan dan tujuan,” pungkasnya.

Sebagaimana harapan dari Pimpinan DPR RI, Kesetjenan dan BK DPR RI menurut Indra juga akan terus mengembangkan *E-Arsip* dan *E-Library* tersebut. Pasalnya, peradaban akan diukur dari seberapa besar generasi muda bisa mengakses ilmu pengetahuan.

Dan ilmu pengetahuan itu berasal tidak hanya dari buku, namun juga dari arsip-arsip yang notabene merupakan sebuah bukti sejarah. Itu semua terangkum dalam *E-Arsip* dan *E-Library*.

Sementara terkait penyerahan arsip DPR RI kepada ANRI merupakan sebuah amanah dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Selain itu ia juga menilai perawatan yang dilakukan ANRI terhadap arsip jauh lebih profesional dan memadai.

Bahkan menurut Indra, klasifikasi yang dimiliki ANRI juga lebih bagus dibanding fasilitas yang di DPR RI. Ia menyadari bahwa ruang arsip di Gedung DPR RI ini sangat terbatas.

Padaahal, lanjut Indra, dengan adanya persidangan dan rapat yang terus menerus berlangsung setiap harinya, sangat memungkinkan arsip DPR RI untuk terus bertambah jumlahnya.

Sementara, ANRI sebagai sebuah institusi yang memang dikhususkan untuk memelihara arsip nasional telah memiliki *space* atau tempat yang lebih memadai. Dengan perawatan yang sangat profesional, untuk menjaga kondisi arsip agar tetap baik.

Penyerahan arsip DPR RI kepada ANRI ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh Setjen dan BK DPR RI. Namun dalam kurun waktu kurang lebih sepuluh tahun kemudian, penyerahan baru terlaksana kembali. Kali ini ada 203 boks arsip yang diserahkan.

Arsip itu terdiri dari lembaran, kaset, video dan CD atas semua produk persidangan dan produk perundang-undangan (legislasi) yang telah dilakukan DPR RI sejak tahun 2009. ■ *ayu/sf*



**PENGAWAS UMUM**  
Pimpinan DPR RI  
**KETUA PENGARAH**  
Ir. Indra Iskandar, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)  
**WAKIL KETUA PENGARAH**  
Dra. Damayanti, M.Si. (Deputi Persidangan)  
**PIMPINAN PELAKSANA**  
Y.O.I Tahapari, S.H, M.Si (Karo Pemberitaan Parlemen)  
**PIMPINAN REDAKSI**  
Drs.Mohammad Djazuli, M.Si (Kabag Media Cetak)  
**WK. PIMPINAN REDAKSI**  
Sugeng Irianto, S.Sos., M.A. (Kasubag Media Cetak),  
Suciati, S.Sos (Kasubag Media Analisis),  
Nita Juwita, S.Sos (Kasubag MedSos dan Website)  
**REDAKTUR**  
Sofyan Efendi  
**SEKRETARIS REDAKSI**  
Guntur Dewanto, Hasri Mentari  
**ANGGOTA REDAKSI**  
Mastur Prantono, Agung Sulistiono, SH,  
Erman Suhendri, S.Sos.I, Erlangga Panji Samudro, S.I.Kom  
Rahayu Setiowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske  
Patuli, Devi Iriandi, Hendra Sunandar, Surahmat Eko,  
Ria Nur Mega, Taufan Syahrulli  
**REDAKTUR FOTO**  
Eka Hindra, Iwan Armanias  
**FOTOGRAFER**  
Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,  
Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Jayadi Maulana,  
Arief Rachman, R. Kresno P.D Moempoeni,  
Azka Restu Fadilah, Gerald Opie  
**ADMINISTRASI**  
Luthfi Suci Nur 'Aini, Damar Maulana Taher  
**ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA**  
Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI  
Gedung Nusantara II Lt. 3  
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta  
Telp. (021) 5715348, 5715350 Fax. (021) 5715341,  
e-mail: bag\_media@dpr.go.id, www.dpr.go.id/berita

**PENERBITAN**  
**PIMPINAN PENERBITAN**  
Dadang Prayitna, S.Ip, M.H. (Kabag Penerbitan)  
**PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI**  
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)  
**PHOTOGRAFER ART**  
Friederick Munchen  
**DESAIN GRAFIS**  
Dito Sugito  
**STAF PRODUKSI**  
Subadri, S.E, Barliansyah,  
Fathurahman, Abdul Kahfi, S. Kom,  
**PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI**  
Eko Priyanto, S.E. (Kasubag Distribusi)  
**KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Maria Dumaris Simanjuntak, S.E, Yudi Kresna  
**ADMINISTRASI**  
Sjaefudin, S.Sos  
**STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI**  
Arif, Lamin, Yuliana Puspita, Ani Permata Sari  
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421  
Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN  
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

# Ketua DPR: Kritik Adalah Vitamin

**Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengaku tidak terkejut dengan adanya kritikan dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) yang disampaikan pada Jumat (23/11) terhadap berbagai kinerja DPR RI. Menurutnya, kritikan tersebut merupakan upaya Formappi untuk mendorong DPR RI menjadi lebih baik dan bentuk rasa cinta rakyat kepada DPR RI agar bisa terus memperbaiki kinerjanya.**



Foto: Naeufurroji | odi

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo.

**B**amsuet, sapaan akrabnya berharap, kritikan tersebut juga bisa didengarkan oleh pihak pemerintah, sehingga harapan Formappi dan masyarakat, DPR RI lebih giat menyelesaikan RUU bisa tercapai. Karena sesuai dengan ketentuan yang ada, pembuatan Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR RI harus bersama-sama dengan pemerintah. Ia menegaskan, DPR RI tidak bisa sendirian apalagi bertindak suka-suka.

“Intinya, kalau kita mau jujur pembahasan sebuah RUU tidak hanya tanggung jawab DPR RI saja. Melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama dengan pemerintah. Artinya, kita bisa lebih jauh lagi meneliti apa penyebab pembahasan sebuah RUU tertunda. Apakah karena disebabkan kelambatan di pihak DPR RI atau di pemerintah yang sering kali tidak hadir dalam rapat kerja dengan komisi terkait,” jelas Bamsuet dalam rilis yang diterima Parlemen, Jumat (23/11).

Legislator Partai Golkar itu mencontohkan, misalnya pada

pembahasan RUU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pemerintah sampai saat ini belum mengirimkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), sehingga DPR RI belum bisa memulai pembahasannya.

Atau kendala lainnya seperti yang pernah terjadi pada pembahasan RUU Karantina Kesehatan. Karena adanya pergantian Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan yang mewakili pemerintah, Dirjen yang baru memerlukan waktu untuk mempelajari substansi RUU.

“Setelah terus menerus diberikan *warning* oleh DPR RI, bahkan

**DPR saat ini justru memasang CCTV raksasa agar rakyat bisa memantau dan mengakses setiap kegiatan kedewanan dari mulai Komisi I hingga Komisi XI plus alat kelengkapan dewan lainnya**

saya sampai perlu menelepon Ibu Menteri Kesehatan, akhirnya rapat pembahasan bisa kembali dilanjutkan dan RUU tersebut bisa disahkan pada Juli 2018 kemarin,” sambung Bamsuet.

Menurutnya, itu hanya sebagian contoh tentang bagaimana kendala yang dihadapi oleh DPR RI dalam membahas sebuah RUU. Karena itu awalnya dalam UU MD3, ada ketentuan pemanggilan atau menghadirkan secara paksa terhadap pihak-pihak yang diperlukan keterangannya oleh DPR RI. Dengan demikian, diharapkan kementerian yang mewakili pemerintah tidak terus menerus menghindar dalam membahas sebuah RUU. Sayangnya pasal pemanggilan tersebut dibatalkan oleh MK.

“Contoh lain, RUU tentang Pengaturan Peredaran Minuman beralkohol dan RUU Tembakau yang sudah melewati 10 kali masa persidangan belum juga tuntas, itu antara lain karena minimnya kehadiran dari pihak pemerintah. Semua ada catatannya di kesekjenan DPR RI,” terang Bamsuet.

Mantan Ketua Komisi III DPR RI itu juga menanggapi, terkait penilaian FORMAPPI bahwa DPR RI kini menjadi lembaga birokratis, tidak sepenuhnya tepat. Kehadiran aplikasi DPR Now! yang bisa di-*download* oleh setiap orang di *smartphone*-nya, justru membuat DPR RI menjadi lembaga yang terbuka.

“DPR saat ini justru memasang CCTV raksasa agar rakyat bisa memantau dan mengakses setiap kegiatan kedewanan dari mulai Komisi I hingga Komisi XI plus alat kelengkapan dewan lainnya. Rakyat juga bisa langsung menuliskan kritik, saran, maupun apresiasi dan aspirasinya melalui aplikasi DPR Now!,” kata Bamsuet.

Saat ini, masih kata legislator dapil Jawa Tengah VII itu, DPR RI juga semakin terbuka dan siapapun bisa datang ke DPR RI kapanpun mereka mau, tanpa ada yang menghalangi. Anggota dewan juga bisa ditemui dengan mudah tanpa adanya keprotokoleran yang kaku dan ketat seperti yang terjadi di negara-negara lain.

“Walau masa tugas periode kami kurang dari satu tahun lagi, namun percayalah kami tidak akan pernah berhenti untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Harapan saya kepada Formappi, jangan pernah lelah untuk terus kritik kami. Karena kritik bagi kami adalah vitamin,” tandas Bamsuet. ■ **ann/sf**

# DPR Dorong Honorer Diberi Remunerasi

**Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengemukakan, sejak awal tahun 2014, DPR RI sudah berkali-kali rapat dengan pemerintah, untuk mendorong pemerintah agar memberikan kejelasan remunerasi kepada para honorer. Pasalnya selama ini mereka sudah terbukti mengabdikan diri di masyarakat, bahkan sudah ada yang mencapai belasan dan puluhan tahun.**

“Kalau jumlah honornya hanya 500 ribu per bulan, itu sangat tidak berperikemanusiaan,” tandas Pimpinan DPR RI Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini saat menerima sekitar 250 penyuluh agama honorer dari Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11).

Lebih lanjut Fadli mengatakan, perlu ada skema dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait batas usia maksimal 35 tahun. Di sisi lain, perlu ada solusi jangka pendek karena masih banyaknya jumlah honorer. Mestinya pemerintah memberikan diskresi, atau kebijakan tidak sesuai aturan, karena kondisi banyaknya honorer dari berbagai latar belakang.

“Bisa dimasukkan jadi PNS, sementara penerimaan PNS baru, bisa dibatasi. Mungkin tidak dimoratorium, tapi mayoritas yang honorer sekitar

atau 75 persen masuk dulu. Harus ada penyelesaian semacam itu,” ungkap legislator Partai Gerindra itu.

Kepada para honorer, Fadli mengharapkan pengaduan yang menjadi keluhan dan aspirasi penyuluh agama honorer dibuat secara tertulis.

Ia menekankan, agar semua dokumen dibuat tertulis, sebagai masukan dan menjadi dasar untuk menindaklanjuti. Menurutnya, pengabdian yang telah dilakukan berhak mendapatkan apresiasi dan penghargaan.

“Tolong ditulis perwakilan honorer bidang apa dan apa aspirasinya. Misalnya penyuluh agama, pertanian, itu beda-beda. Selain tupoksi berbeda, tantangan juga beda. Dengan masukan tertulis, maka bisa ditindaklanjuti. Untuk memperbaiki keadaan, salah satu caranya berani memperjuangkan apa yang menjadi hak-hak kita,” tandas legislator dari Jawa Barat itu.

Melalui penanggung jawab Agus Salim dan Sekretaris Umum Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam (FKPAI) Royani, ratusan honorer ini berharap DPR RI membantu memperjuangkan nasibnya. Berdasarkan informasi, status mereka akan ditingkatkan, namun terhambat dengan batasan usia maksimal 35 tahun. ■ mp/sf

**Perlu ada skema dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkait batas usia maksimal 35 tahun. Di sisi lain, perlu ada solusi jangka pendek karena masih banyaknya jumlah honorer. Mestinya pemerintah memberikan diskresi, atau kebijakan tidak sesuai aturan, karena kondisi banyaknya honorer dari berbagai latar belakang.**



Foto: jay | od

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima kunjungan 250 Penyuluh Agama Honorer (PAH) se-Kabupaten Bogor di Ruang KK II, Gedung Nusantara DPR RI

# BAKN DPR Dorong PLN Batam Tarik Kelebihan Pembayaran



Foto: Natasya

Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dipimpin Wakil Ketua BAKN DPR RI Willgo Zainar bertukar cenderamata dengan BPK RI Provinsi Kepulauan Riau dan PT. PLN Batam, di Kepri

**Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Willgo Zainar meminta anak perusahaan PT. PLN (Persero), yaitu PT. PLN Batam untuk mempertimbangkan hasil putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) mengenai kasus pembayaran berlebih yang dibayarkan PT. PLN Batam kepada PT. TJK Power. Ia memberikan saran setelah mendengar paparan rekomendasi Badan Pengawas Keuangan (BPK) kepada PT. PLN untuk menarik kelebihan pembayaran tahun 2016 dan 2017 semester I sebesar Rp 85 miliar.**

“Jadi Rp 85 miliar itu adalah biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan, itu sudah menjadi keputusan BANI. Sementara dari situ ke depannya kita bisa melakukan penghematan sampai Rp 1 triliun. Kita tetap minta untuk ada upaya agar kita tidak membayar lebih. Tetapi kalau itu kita lakukan atau dilakukan oleh PLN akan membutuhkan proses waktu lagi,” jelas Willgo usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dengan BPK RI Provinsi Kepulauan Riau dan PT. PLN Batam, di Batam, Kepri, Selasa (27/11).

Legislator Partai Gerindra tersebut menyampaikan, BAKN melihat ada celah hukum atas putusan arbitrase yang sudah ditetapkan oleh BANI. Oleh karena itu, pihaknya akan meminta BPK untuk turut meninjau kembali hasil putusan tersebut. Jika memang menarik kelebihan

pembayaran tidak bisa dilakukan oleh PT. PLN Batam, maka harus dibuktikan hal itu merupakan sebuah kerugian. Mengingat hasil audit BPK menetapkan pembayaran yang sudah dilakukan PT. PLN Batam melebihi jumlah yang seharusnya dibayarkan.

“Karena ini sudah terjadi, maka kita harapkan kalau memang memungkinkan untuk *refund* lebih bagus. Tapi kalau tidak bisa ya, yang penting kita harus bisa memahaminya. Jadi selama pembahasan tadi masih belum ada keputusan apakah akan banding atau menerima keputusan. Tapi sementara kami dengar bahwa PT. PLN Batam bisa menerima itu,” imbuh legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Sementara itu, Presiden Direktur PT. PLN Batam Dadang Kurniadwipura menilai jika pihaknya memungkinkan untuk

mengikuti rekomendasi BAKN dengan melakukan banding ke Mahkamah Agung (MA), namun sebelumnya akan dilakukan konsolidasi secara internal untuk melihat putusan arbitrase ini bisa diterima sepenuhnya atau tidak. Menurutnya, PLN Batam perlu memperhitungkan terlebih dahulu keuntungan dan kerugian dari keputusan BANI terhadap pihaknya dan temuan hasil pemeriksaan BPK.

“Jadi ini akan kita konsultasikan juga ke BPK apakah dengan hasil BANI yang nota bene kalau secara *overall* memang saat ini PT. PLN Batam masih diuntungkan walaupun masih ada beberapa hal yang harus kita penuhi. Untuk itu maka kita harus melihatnya secara keseluruhan,” ungkap Dadang.

Ia menegaskan perusahaannya siap memperjuangkan uang kelebihan pembayaran jika BPK sudah memutuskan bahwa PT. PLN Batam tetap harus menarik kelebihan pembayaran pada PT. TJK Power. Namun ia berpendapat jika pihaknya melakukan banding ke yang lebih tinggi, tentu akan ada resiko yaitu apa saja yang sudah dimenangkan di pengadilan sebelumnya bisa saja kalah saat banding diajukan. Sehingga untuk memutuskan akan maju atau tidak, pihaknya akan berkonsultasi kembali dengan BPK dan berkonsolidasi secara internal. ■ nap/sf



# Komisi II Apresiasi Pemkab Lebak Tingkatkan Kehidupan Masyarakat Baduy

**Komisi II DPR RI mengapresiasi dan mendorong Pemerintah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten yang terus berupaya meningkatkan berbagai sisi kehidupan masyarakat adat Baduy dengan tetap mempertahankan kehidupan adatnya. Komisi II DPR RI juga mengunjungi lokasi masyarakat Baduy Luar, dan bertemu dengan sejumlah tokoh adat dan berdialog berbagai masalah.**

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron yang memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI, usai pertemuan dengan Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi dan jajaran, Kamis (22/11) menjelaskan, kunspek kali ini dimaksudkan untuk mendapatkan banyak informasi dan pengawasan terkait persoalan pertanian.

Menurut Herman, ada keunikan di Lebak dengan masih adanya masyarakat adat, komunitas yang berpegang pada adat yaitu Baduy. Selain terkait dengan persoalan bagaimana menjaga masyarakat adat ini tetap eksis di tengah berkembangnya populasi masyarakat Baduy, harus diberi perhatian khusus terhadap pengembangan Kawasan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Sejak lama, lanjut legislator Partai Demokrat itu, Kabupaten Lebak pada tahap tumbuh setelah lama menjadi sebagai kabupaten tertinggal, sehingga semua elemen harus mendorong supaya ada peningkatan kesejahteraan, pendapatan, dan kesehatan. Selain itu Komisi II DPR RI juga akan melihat sebuah pertumbuhan baru di Kabupaten Lebak.

Konsekuensinya, kata Herman, pertumbuhan itu sangat erat kaitannya dengan ketersediaan lahan dan tanah. Kabupaten Lebak sendiri agak sulit berkembang karena dibatasi oleh kawasan hutan dan HGU Perkebunan. "Karena itu kedatangan Komisi II dalam rangka memberi solusi bagaimana kita bisa mendorong agar daerah pertumbuhan ini sejalan dengan ketersediaan tanah dan lahan sebagai sarana pembangunan di Lebak," jelasnya.

Ditambahkan Herman, di Lebak ada lahan seluas 59 hektar yang bersisian dengan PTPN, ada 65 hektar yang beririsan dengan Kawasan Perhutani, ada juga dengan HGU lainnya. Dari PTPN VIII dalam kesempatan ini

menyatakan siap melepas lahannya untuk perluasan Kabupaten Lebak. Komisi II DPR RI menyatakan siap membantu menyelesaikan dengan solusi sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga dalam kunjungan ini menyertakan pejabat dari Kementerian ATR-BPN dan PTPN VIII serta pejabat terkait lainnya.

Menjawab pertanyaan bahwa PTPN VIII mempersilakan lahannya kepada Pemkab Lebak, Herman menyatakan, PTPN dan Perhutani sudah sepakat sebagian kawasannya diambil sebagai bagian wilayah Kabupaten Lebak.

Meski demikian, terkait dengan pengalihan hak atas barang milik negara itu juga tidak semudah yang yang dibayangkan. Setelah ada izin dari

Kementerian BUMN kemudian beralih hak atau kepemilikan Pemkab, masih banyak faktor dan aspek yang harus dirumuskan supaya sehingga tidak menabrak aturan hukum.

"Ini yang perlu dirumuskan dan sudah dibahas di RUU Pertanahan bahwa terkait dengan barang milik negara harus betul-betul dirumuskan secara tepat," kata legislator legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat itu menambahkan.

Terkait persiapan Pemilu serentak April 2019, kata Herman juga ada keunikan dan ingin belajar dari komunitas Baduy. Sebagaimana dipresentasikan Wakil Bupati Lebak, pemilihnya ada tapi tidak bisa membangun TPS di lokasi masyarakat Baduy. Sehingga aparat menyiapkan TPS-nya, kemudian daftar pemilih tetap (DPT) disiapkan dan pelaksanaannya diserahkan kepada masyarakat setempat.

Ada 11 ribu masyarakat Baduy pemegang DPT, mengenai bagaimana mekanismenya akan dibicarakan dengan KPU untuk mengakomodir terhadap masyarakat yang masih berpegang teguh dengan hukum adatnya ini. ■ mp/sf



Foto: Masturi/od

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron bersama Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Baduy, Banten.

# Komisi II Pantau Implementasi PTSL Karawang

**Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali mengatakan, seiring program sertifikasi lahan yang sedang digalakkan pemerintah, dalam menjalankan fungsi pengawasan, pihaknya secara acak mengunjungi daerah-daerah yang menjalankan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kali ini daerah yang dikunjungi adalah Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.**



Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali berdialog dengan petugas Kantor BPN Karawang

Foto: Arief | od.

Legislator Partai Golkar itu saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi II DPR RI ke Karawang mengatakan, persoalan pendaftaran dan sertifikasi tanah di Karawang cukup baik. Termasuk penyelesaian terhadap sekian banyak masalah.

“Alhamdulillah atas kerja sama yang baik antara Kementerian ATR/BPN, Kakanwil BPN Jawa Barat, dan Kantor BPN Karawang, persoalannya bisa selesai,” katanya usai memimpin rapat Tim Kunspek Komisi II DPR RI dengan Kakanwil BPN Karawang beserta Bupati Karawang dan jajarannya, di Kantor BPN Karawang, Jumat (23/11).

Zainudin menambahkan, Jabar dibebani target 1,2 juta sertifikat tanah

pada 2018 ini. Dan Komisi II DPR RI ingin memastikan apakah target tersebut bisa diselesaikan di sisa waktu yang ada. “Karawang selain daerah industri, kita pernah mengenalnya sebagai lumbung padi. Maka seperti apa kira-kira pelaksanaan dan penataan bidang-bidang tanah yang ada di sini termasuk tata ruangnya,” tanya Zainudin.

Bupati Kabupaten Karawang Cellica Nurrachdiana mengatakan, Pemerintah Kabupaten Karawang mendukung program pemerintah ini. Dan tentu untuk sukseskannya tidak boleh ada regulasi pertanahan yang dilanggar. Ia menjelaskan, kendala yang menghambat

Pemda Karawang adalah belum turunnya juklak dan juknis dari Kementerian Dalam Negeri. Akibatnya, bantuan keuangan sebesar Rp 150 ribu per bidang belum bisa dibagikan.

“Dalam waktu dekat kami juga akan merevisi peraturan daerah tentang bea perolehan hak tanah dan bangunan yang terkait PTSL, sehingga masyarakat yang mendapatkan PTSL tidak dikenakan beban pajak kepada daerah. Kami sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat harus mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat. Apalagi, respon masyarakat sangat antusias dengan program ini,” kata Cellica. ■ afr/sf

## Jateng Dinilai Siap Laksanakan Pemilu 2019

**Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali menggelar pertemuan dengan KPU, Bawaslu, Pangdam Diponegoro, perwakilan Kapolda serta Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Tengah. Usai pertemuan, Zainudin berkesimpulan, secara umum Jateng dinilai siap melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, meskipun demikian ia memberikan catatan yang perlu dilakukan evaluasi.**

Secara umum yang kami dapatkan bahwa Jawa Tengah siap melaksanakan Pemilu 2019. Namun demikian ada beberapa hal yang mesti diperbaiki dan

disempurnakan,” ungkap Zainudin di Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Selasa (27/11). Pertemuan ini difasilitasi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sri Purnomo.

Legislator Partai Golkar itu menjelaskan, hal-hal yang perlu disempurnakan tentang penyelenggaraan Pemilu 2019 di Jateng terkait dengan daftar pemilih yang berbasis KTP-Elektronik. Pasalnya data kependudukan sampai nanti hari pencoblosan akan bergerak dinamis, sehingga membutuhkan pemutakhiran secara teliti dan tepat.

“Misalkan tentang daftar pemilih yang berbasis KTP-Elektronik, kan itu memang sudah menjadi ketentuan, data ini sangat dinamis dan bergerak. Teman-teman Anggota Komisi II meminta pastinya seperti apa, karena ini dinamis Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Dukcapilnya

# Penyelenggara Pemilu Dituntut Gencar Lakukan Sosialisasi

**Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo meminta penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) untuk terus menerus melakukan sosialisasi tentang Pemilu serentak 2019. Salah satunya sosialisasi terkait kertas surat suara yang cukup banyak. Karena pemilih dituntut memilih Calon Presiden, Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kab/Kota dan DPD RI. Diharapkan dengan adanya sosialisasi yang masif, masyarakat menjadi tidak bingung.**

“ Sosialisasi jadi bagian yang penting. Karena jumlah pemilih yang di atas umur 50 tahun cukup banyak. Kalau masyarakat yang di bawah 50 tahun, saya kira masih bisa paham tentang banyaknya surat suara,” ungkap Firman saat mengikuti rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan Gubernur Bali I Wayan Koster beserta jajaran di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Selasa (27/11).

Legislator Partai Golkar ini menuturkan bahwa menjadi tugas penyelenggara Pemilu untuk memastikan setiap orang punya pengetahuan tentang Pemilu.

Jika setiap orang yang berhak mengikuti Pemilu memahami tentang mekanisme Pemilu, maka ia bisa memilih dengan cermat, dan menghasilkan Pemilu yang berkualitas.

“Tugas penyelenggara Pemilu adalah memastikan agar tiap orang punya pengetahuan tentang Pemilu. Harapan saya, optimalkan semaksimal mungkin aparatur Pemilu untuk melakukan sosialisasi Pemilu serentak 2019,” pesan Firman.

Firman mencatat sejumlah persoalan Pemilu masih membayangi seperti keberadaan saksi, surat suara, Daftar Pemilih Tetap (DPT) hingga politik uang. Ia mencatat keberadaan saksi di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjadi sangat penting untuk mengurangi konflik Pemilu.

“Kerawanan Pemilu itu pemicunya pada saat pemilihan tidak ada saksi. Nah ini perlu diantisipasi terkait saksi di lapangan. Perlu sosialisasi terkait pentingnya keberadaan saksi,” tandas legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah itu.

Sementara itu Gubernur Bali I Wayan Koster mengapresiasi inisiasi



Anggota Komisi II DPR RI Firman Soebagyo

Foto: Hendra

Komisi II DPR RI guna memantau persiapan Pemilu serentak 2019 di Bali. Ia pun memastikan bahwa Bali sudah siap menghadapi Pemilu di tahun mendatang. ■ hs/sf

meminta waktu untuk memperbaiki,” papar Zainudin.

Zainudin menyampaikan Jateng yang sudah sangat baik dalam pelaksanaan Pilkada pada Juni 2018 lalu, diharapkan pada pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 nanti, juga akan menjadi baik. Ia berharap sukses Pilkada lalu juga berdampak pada sukses Pileg dan Pilpres yang akan datang.

Oleh sebab itu, soal data pemilih di Jateng harus disempurnakan guna mencapai sukses Pemilu 2019. “Kami sampaikan tolong diperbaiki, di-update perkembangan terakhir, karena sebentar lagi tahun 2018 akan berakhir,” ujar legislator dapil Jatim itu.

Dalam pertemuan tersebut, Tim Kunspek Komisi II DPR RI menggali informasi secara langsung mengenai penyelesaian Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan persiapan Pemilu 2019.

Hal lain yang menjadi sorotan Tim Kunspek Komisi II DPR RI terkait penyelesaian program KTP-Elektronik, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), pengamanan dan keamanan Pemilu 2019, serta sengketa pemilu oleh Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). ■ eko/sf



Ketua Komisi II DPR RI Zainudin Amali bersama Sekdaprov Jateng

Foto: Eko/hr

# Komisi II Tinjau Pelayanan Publik Sleman

**Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera ingin memastikan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman, DI Yogyakarta berjalan dengan baik, salah satunya adalah pelayanan perizinannya. Tim Kunspek Komisi II DPR RI juga ingin melihat langsung proses perizinan *online* di Sleman yang sudah menerapkan Sistem *Online Single Submission* (OSS).**

dengan mengundang para pihak terkait. Karena niat baik OSS ini tidak boleh rusak cuma karena ketidakmampuan kita mengelola,” tandas legislator dapil Jawa Barat itu.

Kepala DPMPT Kabupaten Sleman Sutadi Gunarto menyampaikan, dalam menjalankan program OSS di Sleman,

pertengahan 2018 lalu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau OSS. Sutadi meyakini dengan penerapan sistem perizinan OSS ini akan menjadi solusi dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan.

OSS dimaksudkan untuk memangkas waktu dan birokrasi dalam proses perizinan usaha. Kebijakan ini diambil pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan

perekonomian nasional melalui pertumbuhan dunia usaha yang selama ini mengeluhkan panjangnya waktu dan rantai birokrasi yang harus dilewati untuk memulai suatu usaha.

Sementara itu, Wakil Bupati Sleman Sri Muslimatun menjelaskan kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemkab Sleman khususnya di sektor perizinan antara lain telah diterbitkannya Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 tahun 2018 tentang Tahapan Pemberian Izin. Peraturan tersebut di samping mengatur tahapan pemberian izin, juga mengatur dispensasi perizinan khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil.

“Sedangkan Sistem Informasi Pelayanan telah dibangun sejak tahun 2009 yaitu Sistem Informasi Manajemen Pelayanan Perizinan Terpadu (SIMPT) dan telah di perbaharui pada awal tahun 2018 dengan SIMPADU. Namun SIMPADU tidak bisa integrasi dengan OSS maka saat ini sedang mempersiapkan aplikasi *SiCantik Cloud* dari Kementerian Kominfo,” papar Wabup Sleman. ■ *soe/sf*



Foto: Fajar

Tim Kunspek Komisi II DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera meninjau DPMPT Sleman

Dalam kesempatan itu, Tim Kunspek Komisi II DPR RI meninjau inovasi pelayanan publik yang sudah dikembangkan oleh Pemkab Sleman. Mardani mengapresiasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilaksanakan Pemkab Sleman. Bahkan, Pemkab Sleman memberi banyak informasi pelayanan publik yang telah dan akan dilaksanakan. Ia berjanji akan menyampaikan ke daerah lain untuk mencontoh pelayanan publik di Pemkab Sleman.

“Kami melihat bagaimana antrian di PTSP sangat menarik. Ada tempat bagi anak-anak, ada tempat ibu menyusui, ada fasilitas untuk penyandang disabilitas. Kita juga melihat bagaimana pekerja harian lepasnya diberikan penghasilan setara atau di atas UMR. PTSP Sleman sudah bekerja luar biasa,” apresiasi Mardani saat memimpin Tim Kunspek Komisi II DPR RI meninjau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPT) Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Kamis (22/11).

Selama peninjauan ke DPMPT Sleman, tambah legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, Tim Kunspek Komisi II DPR RI juga mendapatkan temuan, ketika OSS dialihkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak *compatible*, termasuk ketika masuk ke Kantor Staf Presiden (KSP).

“Sehingga menurut kami, ini akan menjadi temuan untuk didalami dalam RDP dengan KSP ataupun Rapat Gabungan

**Kebijakan yang telah dilakukan oleh Pemkab Sleman khususnya di sektor perizinan antara lain telah diterbitkannya Peraturan Bupati Sleman Nomor 7.1 tahun 2018 tentang Tahapan Pemberian Izin. Peraturan tersebut di samping mengatur tahapan pemberian izin, juga mengatur dispensasi perizinan khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil**



Tim Kunspek Komisi IV DPR RI melepaskan kepiting di Balikpapan, Kaltim

Foto: Devit | od

## Perlu Langkah Antisipatif Sadarkan Pedagang Komoditas Kepiting

**Perlu dilakukan langkah antisipatif guna memberikan kesadaran kepada pelaku pedagang yang menjual hasil komoditas sumber daya kepiting, agar mereka tidak memperjualbelikan komoditas kepiting yang belum mencapai ketentuan batas ukuran berat dan kriteria lainnya untuk bisa diperdagangkan. Dalam regulasinya, ukuran berat minimum kepiting yang boleh diperdagangkan adalah yang telah mencapai berat 200 gram.**

**D**emikian dikatakan Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI ke Provinsi Kalimantan Timur Agustina Wilujeng Pramestuti saat memimpin pelepasian kembali kepiting-kepiting hasil sitaan dari para pedagang di kawasan mangrove Kariangau, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (28/11).

“Kepiting yang boleh diperdagangkan itu paling tidak beratnya telah mencapai 200 gram. Jadi kepiting-kepiting yang masih kecil-kecil dan yang sedang bertelur ini harus dilepasliarkan kembali. Dan kepiting-kepiting yang dilepas ini diharapkan nantinya dapat tumbuh lebih

besar dari ukuran sebelumnya,” ucap Agustina, usai kegiatan.

Legislator PDI Perjuangan itu juga memberikan apresiasi kepada pihak Balai Karantina Ikan, Pengendalian mutu dan Keamanan Hasil perikanan (BKIPM) Balikpapan yang telah berusaha secara maksimal untuk menyelamatkan komoditas sumber daya yang ada.

“Implementasi pengawasan yang dilakukan oleh pihak karantina Balikpapan sangat baik. Kinerja mereka luar biasa. Hal ini karena didorong oleh perasaan ingin menyelamatkan sumber daya yang ada, supaya generasi mendatang juga dapat menikmati hasil dari sumber daya tersebut,” ujarnya.

Dalam kunjungan ini, sambung Agustina, Komisi IV DPR RI berkesempatan meninjau fasilitas kantor BKIPM Balikpapan yang hampir rampung pembangunannya. “Kita juga melakukan pertemuan untuk mendengarkan berbagai masukan yang disampaikan serta memberikan arahan kepada para stakeholder terkait,” imbuh Agustina.

Agustina mengatakan, Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi alam yang sangat luar biasa terutama sektor perikananannya. “Potensi tersebut harus bisa dimaksimalkan dan dimanfaatkan, namun dengan tetap menjaga keberlanjutannya,” pungkas legislator dari Jawa Tengah itu.

■ tra/sf



Foto: Sofyan | od.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratno didampingi mitra kerja memimpin Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau Bandara Depati Amir Pangkalpinang

## Komisi V Soroti Kerugian Bandara Depati Amir Pangkalpinang

**Komisi V DPR RI menyoroti kerugian yang dialami Bandar Udara (Bandara) Depati Amir Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari hasil pertemuan dengan sejumlah mitra kerja terkait di Pangkalpinang, terungkap bandara berkode PGK itu mengalami kerugian hingga Rp 25 miliar pada tahun 2018 ini. Komisi V DPR RI mendorong PT. Angkasa Pura II sebagai operator Bandara Depati Amir dapat menekan angka kerugian.**

“Angkasa Pura II menjelaskan kerugian Rp 25 miliar ini akan dicari efisiensinya, sehingga kerugian bisa ditekan menjadi Rp 21 miliar. Dan akhirnya mencapai BEP (*Break Even Point* atau titik impas, RED),” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Anton Sukartono Suratno usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI dengan sejumlah mitra kerja di Pangkalpinang, Babel, Jumat (23/11).

Hadir dalam pertemuan ini mitra kerja Komisi V DPR RI, diantaranya

Kementerian Perhubungan, Direksi PT. Angkasa Pura II, Otoritas Bandara Depati Amir Pangkalpinang, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Basarnas, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDDT), Airtel, dan Balai Besar Wilayah Sungai VIII.

Selain itu, Anton juga menyoroti kelebihan kapasitas (*over capacity*) Bandara Depati Amir. Diketahui kapasitas

bandara ini hanya mampu menampung 1,5 juta penumpang setiap tahunnya, namun penumpang yang melalui Bandara Depati Amir sudah mencapai angka 2 juta. Legislator Partai Demokrat itu mendorong agar pengembangan bandara dapat terlaksana untuk mengatasi kelebihan kapasitas itu, namun di sisi lain, pendapatan bandara juga meningkat.

“Penumpang sudah 2 juta, tapi kapasitas hanya 1,5 juta penumpang. Ini sudah *over capacity*, tapi pendapatan minus. Kita butuh pengembangan. Jadi, strategi apa yang akan dilakukan, sehingga untuk menambah pendapatan tercapai, pembangunan juga tercapai. Jangan sampai kita rugi, dan membiarkan saja. Operasional bandara harus tetap berjalan, tidak boleh tutup,” pesan legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat V itu.

Menanggapi sorotan dari Tim Kunspek Komisi V DPR RI, Direktur Teknik dan

Operasi PT. Angkasa Pura II (PT. AP II) Djoko Murjatmodjo menjelaskan, dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang disusun pada tahun 2018, diperkirakan Bandara Depati Amir akan mengalami kerugian hingga Rp 25 miliar. Namun, PT. AP II berkomitmen menekan angka kerugian, sehingga diperkirakan berada di angka Rp 21 miliar. Selain itu, PT. AP II juga akan menekan *Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA)* dari 11 menjadi 8, dan ditargetkan tahun depan menjadi 0.

“Upaya yang kami lakukan adalah optimalisasi terhadap pendapatan dan juga efisiensi biaya. Efisiensi biaya, kami menggeser investasi yang tidak menjadi prioritas. Satu contoh adalah landasan (*runway*). Landasan sepanjang 2600 meter, yang sudah bisa dipakai 2250 meter. Tapi hingga hari ini pesawat terbesar dan jarak terbang terjauh, belum membutuhkan landasan 2600 meter, sehingga pengembangannya kami tunda,” jelas Djoko.

---

**Penumpang sudah 2 juta, tapi kapasitas hanya 1,5 juta penumpang. Ini sudah *over capacity*, tapi pendapatan minus. Kita butuh pengembangan**

---

Selain menggelar pertemuan dengan mitra kerja terkait, Tim Kunspek Komisi V DPR RI juga meninjau progres pengembangan Bandara Depati Amir Pangkalpinang, berupa pembangunan terminal kargo dan pengembangan terminal bandara. Dari hasil pantauan di lapangan, progres pembangunan terminal kargo cukup signifikan. Kontraktor berjanji dalam kurun waktu 1 bulan, pembangunan terminal kargo akan selesai.

Kunspek ini juga diikuti oleh Anggota Komisi V DPR RI Hartanto Edhie Wibowo (Demokrat/Banten III), Bahrum Daido (Demokrat/Sulawesi Selatan III), Jhoni Allen Marbun (Demokrat/Sumatera Utara II), John Siffy Mirin (PAN/Papua), dan Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz (PKB/Jawa Barat III). ■ sf

## Komisi V Dukung Pengembangan Pariwisata Situ Gantung



Foto: Hendra | od

Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban bersama Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau Situ Gantung

**Komisi V DPR RI mendukung langkah-langkah mengembangkan destinasi pariwisata lokal Situ Gantung yang berada di Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, (Tangsel) Provinsi Selatan. Hal ini penting untuk mengurangi angka kemiskinan di Tangsel. Pasalnya jika pariwisata Situ Gantung dihidupkan akan mampu mendongkrak masyarakat dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar Situ Gantung.**

Saat meninjau Situ Gantung, Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi V DPR RI mengapresiasi proses *recovery* yang cepat pasca jebolnya tanggul yang terjadi beberapa tahun lalu. Kini Situ Gantung berusaha dikembangkan agar mampu memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Tangsel.

“Kita lihat Situ Gantung, kami di Komisi V pun terus mendorong agar Situ Gantung ini dijadikan pariwisata lokal yang mampu menjadi destinasi masyarakat untuk datang. Kita siap dukung dari segi anggaran,” ungkap Anggota Komisi V DPR RI Sahat Silaban usai meninjau Situ Gantung, Ciputat, Tangsel, Jumat, (23/11).

Komisi V DPR RI juga sempat melakukan pertemuan dengan Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany. Pada kesempatan tersebut Komisi V DPR RI siap menjaga koordinasi dengan Pemerintah Kota Tangsel guna mengembangkan Situ Gantung ini.

Sahat pun menyambut pertemuan itu sebagai langkah strategis dalam mengembangkan Tangsel sebagai kota baru dengan perkembangan yang cukup pesat. Langkah awal yang dilakukan yakni melakukan inventarisir terhadap persoalan yang terjadi di Situ Gantung.

“Tujuan kunker ke Tangsel adalah meninjau perkembangan infrastruktur PUPR dan perhubungan Tangsel. Kami menginventarisir apa masalah terkait dengan pembangunan infrastruktur di Tangsel,” sambung legislator Partai NasDem itu.

Dalam kesempatan tersebut, Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany mengucapkan terima kasih atas perhatian Komisi V DPR RI terhadap pembangunan di Tangsel ini. Ia pun menyampaikan aspirasinya terkait kebutuhan anggaran di Tangsel yang harus dapat digenjut seiring laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.

Menyikapi permintaan Walikota Tangsel, Komisi V DPR RI mencatat dan nantinya akan melakukan pertemuan dengan pemerintah pusat guna meneruskan apa yang menjadi kendala di Tangsel serta kebutuhan anggaran yang perlu ditambah untuk dibahas dalam RAPBN tahun mendatang. ■ hs/sf

# Komisi V DPR Dukung Penguatan Kelembagaan BPWS

**Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi V DPR RI ke Madura, Provinsi Jawa Timur, secara jelas menyatakan sikap dukungan untuk penguatan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Anggota Komisi V DPR RI Gatot Sudjito menyampaikan, keberadaan BPWS bertujuan untuk melakukan percepatan pembangunan.**

**G**atot mengharapkan, dengan penguatan BPWS diharapkan pembangunan di bidang infrastruktur dan transportasi dapat mempercepat Bergeraknya sektor ekonomi masyarakat setempat. Sehingga berdampak positif terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Suramadu dan sekitarnya.

“Dengan adanya Plt (Pelaksana Tugas, RED) di dalam struktur dan belum ada definitif, itu menandakan belum kuatnya kelembagaan ini. Maka, kita dari Komisi V semua memberikan *support* dan dukungan untuk penguatan kelembagaan ini,” jelas Gatot saat memimpin Kunspek Komisi V DPR RI ke Madura, Jatim, Jumat (23/11).

Ia juga mendorong agar para pejabat di dalam struktur BPWS dikukuhkan menjadi pejabat definitif. Karena kalau struktur pejabat diimbani oleh pejabat Plt, maka akan sulit mengambil kebijakan penting dalam organisasi. “Yang terpenting adalah bahwa lembaga ini harus kuat. Kuat itu dalam bentuk, pejabatnya tidak Plt, ini harus definitif,” tandas Gatot.

Lebih lanjut legislator Partai Golkar ini mengharapkan agar Keputusan

Presiden (Keppres) untuk penguatan BPWS bisa segera diterbitkan. Setelah menyerap aspirasi dari masyarakat, menurutnya Madura ingin maju bersama dengan BPWS.

“Harapan kita Keppres itu segera keluar, kepada Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) Republik Indonesia untuk segera ditindaklanjuti dalam rangka penguatan kelembagaan. Kita akan perjuangkan, kita akan ajak bicara kepada Menteri PUPR, bahwa masyarakat Madura dan progres BPWS itu sangat rasional,” papar Gatot.

Tim Kunspek Komisi V DPR RI telah melihat secara langsung pembangunan infrastruktur yang sedang dilakukan oleh BPWS di wilayah Suramadu, Jawa Timur. Tim Kunspek juga menginventarisir permasalahan-permasalahan dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh BPWS.

Dalam Kunspek ini, Komisi V DPR RI juga menyerap aspirasi dari *stakeholder* dan masyarakat wilayah Suramadu atas



Foto: Eko | Iod

Tim Kunspek Komisi V DPR RI meninjau pembangunan infrastruktur oleh BPWS

program-program BPWS pada pembangunan infrastruktur yang telah dan sedang berjalan.

Perwakilan dari Tokoh Madura H. Rawi menilai, apa yang sudah dikerjakan oleh BPWS telah berdampak positif. Menurutnya BPWS juga telah menjadi mitra bagi pemerintah daerah di empat kabupaten di Pulau Madura. “Secara bertahap pembangunan ini menjadi percepatan bagi peningkatan Madura,” katanya.

Di sisi lain ada H. Zaini, salah satu tokoh Madura yang tegas menentang pembubaran BPWS. “Seharusnya pembangunan di Madura itu didukung. Termasuk oleh Anggota Komisi V DPR RI. Istilah kami, kalau sampai dibubarkan itu sama saja membubarkan Madura,” tegas dia. ■ eko/sf

## Komisi VII Soroti Kekurangan Cadangan Daya Listrik Lampung

**Komisi VII DPR RI menyoroti masalah kurangnya cadangan daya listrik di Provinsi Lampung. Padahal Lampung kaya dengan sumber daya alam yang sangat menjamin ketercukupan cadangan daya listrik, seperti tambang batubara dan sumber-sumber mata air. Oleh karena itu, Komisi VII DPR RI meminta kepada PT. PLN Regional Sumatera mengembangkan infrastruktur cadangan daya listrik di Lampung.**

**H**al ini diungkapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Tamsil Lindrung saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI dengan Dirjen

Ketenagalistrikan, Dirjen EBKTE Kementerian ESDM, Direksi PT. PLN, Kadis ESDM Provinsi Lampung, Bupati Lampung Selatan, dan Plt. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Lampung, di PLTU Tarahan, Senin (26/11).

“Kok bisa terjadi kekurangan cadangan daya listrik di Lampung? Kaget kita mendengarnya. Idealnya cadangan daya listrik mencapai 30 persen. Harus ada pembangunan infrastruktur pembangkit baru pada tahun 2019. Harapan kami, dengan Kunspek ini bisa menjadi bagian dari solusi, sehingga ke depan tidak terjadi lagi gangguan listrik yang mengakibatkan pemadaman listrik,” jelas Tamsil.

Sementara Direktur PT. PLN Regional Sumatera Waluyo Kusdiharto mengatakan, secara umum cadangan listrik di Lampung



# Komisi VIII DPR Berharap Madrasah Tangkal Pengaruh Negatif Medsos

**Komisi VIII DPR RI berharap madrasah dapat menangkal pengaruh negatif dari media sosial. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan, saat ini banyak informasi keagamaan yang tidak jelas sumbernya muncul di media sosial. Kementerian Agama sebagai institusi yang membawahi madrasah diharapkan dapat memberikan benteng pengetahuan agama bagi siswa-siswanya.**



Foto: Azka | lod.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang memimpin Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI ke MAN I Magelang

Belakangan kita menghadapi tantangan luar biasa yang datang dari media sosial. Media sosial saat ini sangat semrawut dan kita dengan mudah terpengaruh. Selain menjaga nilai

spiritual dan intelektual, madrasah harus bisa menangkal tantangan luar biasa ini,” kata Marwan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik ke Magelang, Jawa Tengah, Jumat (23/11).

Marwan berharap siswa madrasah yang berada di bawah pembinaan Kemenag dapat melakukan penangkalan terhadap informasi keagamaan yang tidak semestinya beredar di media sosial. “Kita berharap produk pengetahuan yang dihasilkan madrasah, pesantren, dan lain-lain itu bisa meminimalisasi pengaruh informasi negatif dari media sosial,” kata Marwan.

Legislator PKB itu pun menyampaikan keberadaan madrasah juga harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Hal ini menurut Marwan juga dalam rangka mewujudkan harapan para orang tua untuk melihat pendidikan madrasah yang lebih berkualitas. “Jangan biarkan madrasah tanpa sarpras yang memadai,” imbuh legislator dapil Sumut itu.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Magelang Zaenal Arifin mengungkapkan tiga hal yang diperlukan untuk memenuhi harapan wali murid di madrasah. Tiga hal tersebut terdiri dari infrastruktur, sumber daya manusia, dan dukungan operasional.

“Ketiga hal ini harus berjalan bersama-sama. Infrastruktur bagus, tetapi kalau SDM yang mengelolanya tidak bagus, juga akan mengganggu. Dukungan operasional pembiayaan juga perlu didukung,” ujar Zaenal sembari berharap Kunspek Komisi VIII DPR RI dapat menjadi kontribusi positif bagi pendidikan agama di Kabupaten Magelang ini. ■ azk/sf

sekitar 6 persen. Tentunya cadangan ini sangat tipis, pertumbuhan permintaan listrik setiap tahunnya antara 7-9 persen.

Dalam meningkatkan cadangan listrik di Lampung, pihaknya akan membangun transmisi baru dari Sumsel ke Lampung, yakni Gumawang-Kayuagung-Seputih Banyak-Menggala.

Dengan adanya dua transmisi tersebut diharapkan mampu menambah kehandalan pasokan listrik ke Lampung, guna menghindari pemadaman listrik di Lampung.

Lebih jauh ia mengatakan dalam meningkatkan cadangan listrik di Lampung, awal tahun 2019 pihaknya akan membangun Proyek Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) di Tarahan yang berkapasitas sebesar 2x100 MW dan akan beroperasi pada tahun 2021.

■ iw/sf



Foto: Iwan | lod.

Tim Kunspek Komisi VII DPR RI meninjau PLTU Tarahan di Lampung Selatan, Lampung

# Komisi IX Tinjau Implementasi dan Efektivitas UU PPMI di Bali

**Komisi IX DPR RI meninjau implementasi dan efektivitas pemberlakuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) di Provinsi Bali. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay ini, Tim Kunspek juga ingin mendengar permasalahan yang dihadapi dalam penerapan asuransi BPJS Ketenagakerjaan di Bali.**



Foto: Andri | oed.

Tim Kunspek Komisi IX DPR RI ke Bali dipimpin Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay (tengah)

“ Kami melaksanakan kunjungan untuk melihat pekerja migran pelayaran, baik mereka yang bekerja di kapal pesiar, nelayan, dan lain sebagainya. Kita ingin memastikan apakah undang-

undang yang sudah kita sahkan efektif atau tidak, juga ingin memastikan pekerja mendapatkan program BPJS Ketenagakerjaan” ujar Saleh di Denpasar, Bali, Jumat (23/11).

Dari hasil pertemuan dengan pihak-pihak terkait, dua regulasi itu baik UU PPMI dan Asuransi BPJS Ketenagakerjaan di lapangan justru belum berjalan efektif. Sehingga para pekerja di kapal pesiar ini tidak mendapatkan haknya. Pekerja migran belum mendapat berbagai kemudahan akses kerja sekaligus perlindungan hukum.

Temuan sementara Komisi IX DPR RI, ungkap Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI ini, masih ada tumpang tindih kebijakan di daerah menyangkut regulasi ketenagakerjaan.

“Seluruh pekerja kita di luar negeri harus mendapat perlindungan dari negara. Tentu ada peraturan pemerintah dan peraturan dari setiap kementerian. Yang harus diingat, kebijakannya harus satu dan dilakukan sinkronisasi. Jangan setiap kementerian mengeluarkan kebijakan sendiri-sendiri. Satu kebijakan, tapi pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing institusi,” tegas Saleh.

Legislator dapil Sumatera Utara itu mengingatkan, tumpang tindih kebijakan tidak boleh terjadi, karena akan merugikan para pekerja. Tidak boleh ada ego sektoral dalam mengurus pekerja migran. Dia juga menegaskan, mendapatkan perlindungan pekerjaan adalah hak asasi manusia (HAM) dan negara menjamin hak warganya tersebut.

## Pemda Berperan Kembangkan Ekraf

“ Kepala daerah merupakan ujung tombak dari pengembangan ekraf, pusat tidak bisa berdiri sendiri harus di-support pemda dalam pengembangan ekraf,” ungkap Meli, sapaan akrabnya, saat mengikuti pertemuan antara Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dengan Gubernur Provinsi Banten dan jajaran, di Serang, Banten, Kamis (23/11).

Terlebih, lanjut legislator Partai Gerindra itu, setiap daerah memiliki ciri khas berbeda. Di Provinsi Banten misalnya, ada ekraf yang berasal dari pengembangan budaya, wisata hingga kriya yang perlu mendapat dukungan dari pemda, mulai dari permodalan, sarana prasarna hingga pemasaran.

**Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliyana mengatakan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pengembangan ekonomi kreatif (ekraf). Bahkan, kemampuan daerah mendukung ekraf menjadi bagian terbesar yang dibicarakan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Ekonomi Kreatif (RUU Ekraf).**



Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliyana (tengah)

Foto: Ria | oed.

Saleh menambahkan, pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Ketenagakerjaan dan BPJS Ketenagakerjaan harus membenahi sistem perlindungan pekerja migran, sehingga pekerja migran Indonesia terlindungi dari pelanggaran HAM seperti kerja paksa, kekerasan, dan menghilangkan hak-hak pekerja.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) dan ESDM Provinsi Bali Ni Luh Made Wiratmi mengeluhkan masih tumpang tindihnya berbagai peraturan dari Menteri Ketenagakerjaan Menteri Perhubungan menyangkut pekerja yang bekerja di kapal pesiar.

Menanggapi hal tersebut, Saleh menjelaskan bahwa perusahaan pelayaran seperti terikat secara langsung dengan beberapa kementerian, seperti Kemenaker dan Kementerian Perhubungan. Oleh karena itu, Saleh memperjelas kewenangan masing-masing kementerian.

Contohnya, persoalan yang berkaitan dengan bisnis dan teknis perusahaan pelayaran, menjadi kewenangan dari Kementerian Perhubungan. Sementara itu, berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pengawasan mengenai ketenagakerjaan menjadi bidang kerja pengawas ketenagakerjaan.

“Artinya ketika terjadi kecelakaan kerja, penanganannya yang pertama kali dan yang berwenang adalah instansi Kemenaker atau Disnaker atau yang lebih dikenal lagi dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan,” tutup Saleh kepada

**Parlementaria.** ■ man/sf

“Banten merupakan wilayah yang terdiri atas 8 Kabupaten/Kota. Maka sosialisasi RUU Ekraf kepada pemerintah daerah menjadi bagian yang tidak boleh diabaikan. Karena kita berbicara mengenai permodalan, sarana prasarana, Hak Intelektual (HaKi) dan pemasaran,” ujarnya.

Legislator dapil Sumatera Selatan itu menambahkan, Banten sendiri merupakan salah satu penyumbang terbesar ekonomi nasional melalui ekraf, yaitu sebesar 15,66 persen. Untuk itu, jika pemerintah ingin fokus mengembangkan ekraf, maka antar *stakeholder* harus meningkatkan kerja sama.

“Kata kunci dalam kesuksesan pengembangan ekraf adalah koordinasi antar *stakeholder*. Karena tidak mungkin pelaku ekraf tumbuh berkembang sendiri-sendiri. Dalam hal ini diharapkan pemma bersinergi,” pesan Meli. ■ rnm/sf



Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz bertukar cenderamata dengan Pemprov Sumsel.

Foto: Ryan Loc

## Permenaker Nomor 7 Tahun 2017 Harus Segera Direvisi

**Permasalahan yang timbul berulang-ulang terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebenarnya bisa diselesaikan apabila Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia direvisi dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).**

**M**asalah tersebut yang menjadi fokus utama dalam Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IX DPR RI ke Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (23/11). Dalam rapat yang dipimpin Anggota Komisi IX DPR RI Irgan Chairul Mahfiz, hadir perwakilan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, BPJS Ketenagakerjaan, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI), serta Buruh Migran Sumsel.

Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan, Komisi IX DPR RI sangat menyayangkan fasilitas yang berbeda antara konsorsium asuransi dan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan perlindungan terhadap para PMI.

“Risiko yang ditanggung oleh BPJS Ketenagakerjaan lebih sedikit dibandingkan risiko yang ditanggung oleh konsorsium asuransi yang sebelumnya. Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan hanya menanggung 6 dari 13 *coverage* perlindungan PMI yang sebelumnya ditanggung oleh konsorsium,” tutur Irgan.

Irgan mengharapkan ada perluasan jaminan risiko dari BPJS Ketenagakerjaan dengan menggandeng pihak lain yang dapat meng-cover 7 risiko yang tidak dapat di-cover oleh BPJS Ketenagakerjaan. Sementara premi iuran yang ditanggung PMI ke BPJS Ketenagakerjaan hampir sama besar dengan yang sebelumnya.

“Kami mendengar dari masih kurang dua perlindungan yang belum sanggup dipenuhi oleh BPJS Ketenagakerjaan, yaitu perlindungan bantuan hukum bagi PMI serta gaji yang belum dibayar. BPJS Ketenagakerjaan juga menambah beasiswa untuk anak PMI yang semula dari satu anak menjadi dua anak,” tutur legislator dapil Banten itu.

Sementara itu, Anggota Komisi IX DPR RI Imam Suroso (PDI-Perjuangan) meminta Pemprov Sumatera Selatan untuk memantau para pekerja migran asal daerahnya yang bekerja di Malaysia, apakah terkena dampak dari perusahaan yang pailit dan banyak pekerja migran Indonesia yang ada di perusahaan tersebut.

“Saya meminta Kementerian Ketenagakerjaan serta Pemprov Sumsel untuk memantau apakah pekerja dari migran dari Sumsel ada yang bekerja disana atau tidak, dan penanganannya seperti apa dari pihak BPJS Ketenagakerjaan dari kasus tersebut,” tutur legislator dapil Jawa Tengah itu. ■ rh/sf

# Komisi IX Dorong Sinkronisasi Data Pekerja Migran di Sulsel

**Komisi IX DPR RI terus mendorong proses sinkronisasi data Pekerja Migran Indonesia (PMI) khususnya di wilayah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan untuk memudahkan pengawasan dan perlindungan PMI selama bekerja di luar negeri. Pasalnya, belum sinkronnya data PMI itu, menimbulkan sejumlah permasalahan, termasuk di daerah.**

Hal tersebut diungkapkan Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI dalam rangka Pengawasan Asuransi Pekerja Migran Indonesia Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan, Jumat (23/11).

“Belum sinkronnya data PMI ini merupakan penyakit kronis. Setiap dinas dan kementerian punya data masing-masing yang belum tersinkronisasi dengan baik. Kita berharap ada satu badan yang benar-benar dipercaya untuk melakukan pendataan ini sehingga semuanya menjadi sinkron,” imbuh Suir Syam, saat pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR RI dengan Pemprov Sulawesi Selatan dan para mitra kerja yang ikut mendampingi.

Legislator Partai Gerindra ini juga memperoleh informasi dari instansi terkait bahwa banyak masyarakat Sulawesi Selatan yang bekerja sebagai buruh migran antara lain ke Malaysia, Hongkong, Singapura, dan negara lainnya. Khusus Malaysia mayoritas bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit.

“Kita menggali apa saja yang sudah dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemprov Sulsel, dari Dinas Ketenagakerjaan, BP3TKI, BNP2TKI, dan BPJS Ketenagakerjaan apakah sudah menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengawasi dan melindungi para pekerja migran yang berasal dari Sulsel,” tandasnya.

Suir Syam menyinalir masih banyak PMI yang tidak terdaftar, sehingga ketika mereka sakit tidak menerima fasilitas pengobatan dengan semestinya. Banyak PMI memilih jalur ilegal karena menganggap terlalu sulit prosedur yang harus dilewati jika melalui jalur resmi (legal). Hal ini tentu menjadi keprihatinan dan



Tim Kunspek Komisi IX DPR RI memantau Pengawasan Asuransi PMI melalui BPJS Ketenagakerjaan

perlu didorong instansi terkait untuk memperbaiki prosedur bekerja di luar negeri secara legal agar lebih mudah.

“Kita akan berikan masukan kepada pemerintah bagaimana menyempurnakan perlindungan pekerja migran di luar negeri. Aturan mengenai pekerja migran ini sebenarnya sudah cukup jelas dan lengkap hanya saja faktor keterpaksaan karena sulitnya mencari pekerjaan di dalam negeri sehingga mereka tak jarang menempuh jalur ilegal. Banyaknya jalur administrasi yang dilewati inilah alasan mengapa mereka mengambil jalan pintas melalui pintu-pintu ilegal,” ujar Suir Syam.

Ia menambahkan, 90 persen orang Makassar yang bekerja ke Malaysia di perkebunan sawit, padahal Indonesia memiliki perkebunan sawit yang jauh lebih luas dibanding Malaysia. Kenapa mereka memilih bekerja di perkebunan Malaysia, seharusnya pemerintah membuka lapangan kerja lebih banyak lagi agar masyarakat tak perlu lagi menjadi PMI.

“Kita perlu sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah daerah terkait pekerja migran ini. Mereka harus diberi pelatihan-pelatihan dan mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan selama menjadi pekerja

migran di luar negeri,” tukas legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat I ini.

Mantan Walikota Padang ini menambahkan, jika menjadi PMI legal, maka akan memperoleh keuntungan-keuntungan dengan pelayanan dan perlindungan dari perwakilan Pemerintah Indonesia selama bekerja di luar negeri. Kalau ilegal, maka pemerintah tidak bisa melindungi karena yang berlaku hukum negara lain.

Sementara itu, Kadisnakertrans Pemprov Sulsel Agustinus Appang menjelaskan bahwa persoalan pekerja migran ini paling banyak di Kabupaten dan Kota, karena di sana paling banyak pintu-pintu keluar negeri itu dari Pemkab/Pemkot. “Kita upayakan proses sosialisasi secara maksimal dan bersinergi dengan beberapa instansi terkait. Seperti imigrasi, Disnakertrans, BP3TKI, BNP2TKI dan BPJS Ketenagakerjaan,” tambahnya.

Agustinus menambahkan, pada Januari 2018 sudah ada kesepakatan sinergitas antara lembaga-lembaga terkait penanganan PMI melibatkan Imigrasi, BPJS Ketenagakerjaan, Disnaker, dan BNP2TKI. Satgas ini harus diaktifkan dan dimaksimalkan kinerjanya agar mencapai hasil yang diinginkan. ■ oji/sf



# Kriya Miliki Progres Menjanjikan

**Kriya atau kerajinan souvenir cenderamata merupakan bidang ekonomi kreatif yang saat ini sedang menonjol selain bidang *fashion*, kuliner, film, dan animasi. Nyaris di semua daerah di seluruh Indonesia memiliki hasil kriya. Hal itu tentu dapat mendukung potensi progres yang menjanjikan di sektor ekonomi kreatif.**

ekonomi kreatif. Dimana disebutkan harus ada sinergi antara pemerintah daerah dengan pihak perbankan dalam membiayai pelaku ekonomi kreatif, dan juga kehadiran *sponsorship* atau lebih tepatnya program *Corporate Social*

*Responsibility* (CSR) dari beberapa perusahaan yang ada.

“Tinggal pemerintahnya memikirkan masalah regulasinya, agar komitmen-komitmen dari berbagai pihak itu terikat dalam satu hal, yaitu memajukan ekonomi kreatif di Kota Semarang. Maka secara tidak langsung juga akan menjadi nilai tambah dari ekonomi yang biasa, seperti UKM meningkat menjadi ekonomi kreatif sehingga ada *value* editnya di sana,” tutur Mujib.

Oleh karena itu regulasinya harus ada, lanjut legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah itu. Selain itu, secara kelembagaannya juga perlu dipikirkan apakah akan dikaitkan dengan sektor industri, koperasi, perdagangan, atau bahkan menjadi dinas sendiri.

“Pemerintah belum memiliki panduan undang-undangnya. Oleh sebab itu,

saya meminta agar pihak Badan Ekonomi Kreatif bisa menyelesaikan masalah ini dengan pemerintah pusat, dalam hal ini yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Bappenas, dan juga presiden terkait komitmennya untuk membangun ekonomi kreatif,” tandasnya.

Bidang ekraf akan membuka lapangan kerja yang sangat luar biasa. Mujib berharap RUU Ekraf tersebut dapat segera diselesaikan.

“Kita ingin supaya berbagi tugas. Tugas dari Bekraf adalah menyelesaikan masalah yang terkait dengan kelembagaannya, apakah akan menjadi Kementerian sendiri atau akan menjadi bagian dari pada perdagangan atau pariwisata. Dan yang kedua adalah kalau hal ini memang serius, maka pembiayaannya juga harus dipikirkan oleh pemerintah.” tutup Mujib. ■ [dep/mp/sf](#)



Foto: Devi Iod.

Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat bersama Tim Kunspek Komisi X DPR RI melihat hasil kriya di Semarang

“Ini bisa menjadi tren yang sangat luar biasa, dan ini akan menjadi salah satu penopang utama devisa bagi negara,” kata Anggota Komisi X DPR RI Mujib Rohmat di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi X DPR RI ke Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (22/11). Kunspek dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Djoko Udjiyanto (Demokrat).

Legislator Partai Golkar itu menyampaikan, dalam kunjungan kerja spesifik ke Kota Semarang ini, Komisi X DPR RI banyak mendapatkan masukan penting yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Ekonomi Kreatif (RUU Ekraf).

“Hari ini kita mendapatkan masukan yang cukup banyak, diantaranya adalah tentang bagaimana pandangan dari sudut perencanaan dan pelaksanaan ekonomi kreatif yang cukup bagus yang

telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang,” ucap Mujib.

Mujib mengatakan, Komisi X DPR RI melihat Kota Semarang berbenah diri secara luar biasa dari beberapa hal yang terkait dengan masalah ekonomi kreatif. Menurutnya, untuk membangun ekonomi kreatif di Kota Semarang haruslah mempunyai visi tentang upaya bagaimana mewujudkan Kota Semarang untuk bisa dijadikan sebagai sentral ekonomi kreatif.

“Semarang merupakan pusat dari pendidikan perguruan-perguruan tinggi, dengan demikian sumber daya manusianya juga sangat mendukung apabila pemerintah kotanya mempunyai visi menjadikan Semarang sebagai sentral ekonomi kreatif,” ujar Mujib.

Mujib menambahkan, dalam pertemuan dengan Pemerintah Kota Semarang, ada juga beberapa masukan tentang masalah pembiayaan

# Komisi VII Harapkan PT. WHW jadi Pusat Pengembangan Industri Bauksit



Tim Kunker Komisi VII DPR mengunjungi PT. Well Harvest Winning (WHW) Alumina Refinery di Kalbar.

Foto: Agung

**Komisi VII DPR RI berharap PT. Well Harvest Winning (WHW) Alumina Refinery dapat menjadi pusat pengembangan industri berbasis bauksit di Indonesia. Alasannya, perusahaan yang berlokasi di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat itu mampu mengolah dan memurnikan bijih bauksit menjadi alumina yang menghasilkan Smelter Grade Alumina berkadar  $\geq 98,6$  persen, dengan kapasitas produksi 1 juta ton per tahun.**

**A**nggota Komisi VII DPR RI Katherine Anggela Oendoen mengatakan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, telah memberi angin segar bagi tumbuh dan berkembangnya industri pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, salah satunya adalah PT. WHW Alumina Refinery di Ketapang ini.

“PT. WHW Alumina Refinery ini diharapkan menjadi pusat pengembangan industri berbasis bauksit di Indonesia,” katanya saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsppek) Komisi VII DPR RI ke PT. WHW Alumina Refinery, dalam rangka pengawasan sektor pertambangan khususnya menyangkut hilirisasi produk pertambangan bauksit di Ketapang, Kalbar, Senin (26/11).

Dalam peninjauannya ini, Tim Kunsppek Komisi VII DPR RI diterima Direktur Operasional PT. WHWAR Zhao Jialiang, Direktur External Relations PT. WHWAR

Stevi Thomas, dan Direktur External Relations PT. WHWAR Dev Herindra.

Komisi VII DPR RI berharap, kegiatan usaha pertambangan termasuk kegiatan hilirisasinya yang ada di Ketapang, dapat berjalan dengan baik sesuai dengan UU Pertambangan Minerba dan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) telah menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Legislator Partai Gerindra ini mengingatkan mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Selain itu, mineral dan batu bara yang

terkandung dalam perut bumi wilayah pertambangan Indonesia mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak.

Maka pengelolaannya harus memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan.

Menurutnya, bauksit yang merupakan salah satu sumber daya alam tidak terbarukan (*non-renewable*) yang banyak terdapat di Kalbar. Cadangan bauksit di Kalbar sejumlah 0,84 milyar ton dari total cadangan nasional 1,26 milyar ton atau 66,77 persen cadangan bauksit nasional ada di Kalbar. Sedangkan sumber daya bauksit nasional sebanyak 3,61 milyar ton.

“Besarnya cadangan bauksit di Kalimantan Barat diharapkan mampu meningkatkan perekonomian masyarakat di Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Ketapang ini,” harap legislator dapil Kalbar ini. ■ as/sf

# Wartawan Parlemen Diminta Citrakan Kewibawaan DPR

**Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Rendy Affandy Lamadjido mengatakan, melalui acara *Press Gathering* dalam rangka Silaturahmi DPR RI dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen tahun ini, ia meminta wartawan di lingkungan DPR RI harus mampu mencitrakan kembali DPR RI sebagai lembaga yang berwibawa dan lembaga yang mampu menyerap aspirasi masyarakat.**

Dengan demikian bisa mensejahterakan para wartawan di lingkungan DPR RI. Anggota Komisi V DPR RI ini sudah memikirkannya dari 2 tahun lalu, dan berkomitmen memperjuangkannya ■ **tn/sf**

“Tentu saya berharap banyak teman-teman *Press Room* DPR mampu mencitrakan kembali DPR sebagai lembaga yang berwibawa dan lembaga yang mampu menyerap aspirasi masyarakat. Dengan demikian yang diuntungkan bukan hanya Anggota DPR, tetapi wartawannya. Karena jika beritanya dipercaya masyarakat, maka berita tentang DPR akan dicari,” imbuhnya saat menghadiri *Press Gathering* di Wisma Griya Saba DPR RI, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/11).

Legislator PDI Perjuangan ini menyampaikan citra DPR RI pada tahun ini sudah jauh lebih baik di mata masyarakat.

Menurutnya, berbeda dengan tahun 2013 yang lalu, saat itu citra DPR RI di mata masyarakat sudah anjlok.

“Tahun 2013 itu, citra DPR anjlok. Masyarakat sudah tidak mau lagi baca berita tentang DPR karena kurangnya minat masyarakat terhadap DPR. Tetapi sekarang sudah berubah. Wartawan *Press Room* sudah mampu mengangkat kembali citra DPR. Sehingga sekarang DPR sudah kembali lagi dipercaya oleh masyarakat,” kesannya.

Lebih lanjut legislator dapil Sulawesi Tengah itu mengharapkan di masa yang akan datang, wartawan *Press Room* DPR RI juga harus dibuatkan koperasi sendiri.



Foto: Rumi | Odi.

Anggota BURT DPR RI Rendy Affandy Lamadjido

## Penggunaan Teknologi Tak Bisa Ditawar

**Perkembangan teknologi di era digital saat ini sudah sangat pesat. Tak ingin ketinggalan, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat RI Indra Iskandar menegaskan bahwasanya pemanfaatan teknologi informasi untuk mempublikasikan kinerja Dewan saat ini sudah tidak bisa ditawar lagi.**

“Kita harus agresif dalam mempublikasikan produk-produk Dewan agar cepat diketahui dan mudah diakses oleh masyarakat,” tegas Indra pada acara “*Launching Website Sistem Data Informasi Penelitian* serta Peluncuran Buku 3 Tahun Badan Keahlian DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11).

Dari 560 Anggota DPR RI, menurut Indra, tidak sampai setengahnya yang aktif mengisi laman *blog* di *website* DPR RI ([www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id)) yang sudah disiapkan. Untuk itu, ia meminta agar tenaga ahli harus aktif mengisi *blog* Anggota Dewan agar masyarakat tahu Anggota DPR RI tetap bekerja untuk rakyat.

Indra mengapresiasi terobosan yang dilakukan oleh Pusat Penelitian BK DPR

RI meluncurkan *website* sistem data informasi penelitian. Ia menambahkan, langkah ini merupakan cita-cita bersama menuju Parlemen Modern.

Di samping itu, Indra mengungkapkan buku dengan judul “3 tahun Badan Keahlian Bekerja untuk DPR RI” telah memberikan pencerahan tentang bagaimana pentingnya Badan Keahlian DPR RI ini dalam memberikan keahlian pada Dewan yang terhormat.

“Di samping telah berhasil meningkatkan kapasitas para tenaga fungsional, BK DPR RI dibawah kepemimpinan Pak Johnson Rajagukguk juga berhasil menggalang kerja sama dengan berbagai universitas, semata-mata untuk kemajuan BK DPR RI,” pungkas Indra. ■ **es/sf**



Foto: Rumi | Odi.

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar.

# Peneliti DPR Dikukuhkan Sebagai Profesor Riset

**Peneliti dari Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dikukuhkan sebagai profesor riset bidang struktur dan perubahan sosial. Peneliti yang dikukuhkan tersebut adalah Dr. Ujianto Singgih Prayitno, M.Si, yang menjadi Profesor Riset ke-2 dari DPR RI dan ke-503 secara nasional.**

Pengkukuhan Profesor dilangsungkan dalam Sidang Majelis Profesor Riset yang dipimpin Wakil Kepala LIPI Prof. Dr. Bambang Subiyanto, dihadiri Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan sejumlah Anggota DPR RI. Turut hadir sejumlah pejabat di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, akademisi dan undangan lainnya di Gedung Nusantara V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (28/11).

Profesor Ujianto menyampaikan orasi ilmiahnya dengan judul “Membangun Keberadaban Masyarakat: Perspektif Sosiologi Legislasi” yang dilanjutkan dengan pemasangan Widyamala serta penyerahan sertifikat.

Dalam risetnya, ia memaparkan dewasa ini masyarakat Indonesia berada dalam perubahan sosial yang luar biasa terjadi di berbagai kehidupan politik, sosial, budaya dan ekonomi. Hal ini didasarkan karena menguatnya demokrasi di bidang tersebut, termasuk masifnya pembangunan infrastruktur.

“Ini adalah kondisi yang dapat menjadi inspirasi dalam pergulatan mewujudkan sosiologi legislasi dalam penyusunan naskah akademik dan RUU menuju masyarakat Indonesia yang berkeadaban,” kata Ujianto yang memulai karirnya sebagai Asisten Peneliti Muda pada tahun 1995 itu.

Peneliti yang telah menghasilkan 64 karya tulis ilmiah ini memaparkan, dalam proses pembentukan undang-undang, Anggota DPR RI sering berhadapan dengan sistem kontrol yang dibangun oleh Fraksi dalam interaksi pembahasan UU oleh kepentingan Dewan bersama pemerintah yang juga mempertahankan kepentingannya. Menurutnya, Anggota DPR RI harus mampu menciptakan jarak kritis antara dirinya dengan situasi yang dihadapinya sebagai representasi rakyat untuk mewujudkan aspirasi mereka.

Kepala Badan Keahlian DPR RI Johnson Rajagukguk turut memberikan sambutan. Ia mengatakan pengukuhan Profesor Riset kali ini adalah pertama kali

sejak terbentuknya Badan Keahlian DPR RI pada tahun 2015. Menurutnya, Setjen dan Badan Keahlian DPR RI selalu mendukung supaya peneliti dan pejabat fungsional terus meningkatkan kompetensinya.

“Kita berharap, profesor baru kita bisa menjadi inspirasi bagi juniornya. Besar harapan kita, pengukuhan hari ini diikuti dengan pengukuhan profesor berikutnya. Kita tidak menetapkan target, tetapi lahirnya profesor-profesor baru tentu saja akan mewarnai layanan badan keahlian sebagai *supporting system* DPR,” ujar Johnson.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto juga turut memberikan apresiasinya. Dikatakannya, jumlah Profesor Riset di Indonesia masih sangat minim. Diketahui, saat ini jumlah profesor riset di Indonesia yang masih aktif hanya berjumlah sekitar 218 orang dari 9.685 jumlah peneliti nasional.

“Ini harus kita dorong terus supaya target profesor bisa meningkat. DPR memberikan keleluasaan di dalam lapangan penelitian, saya yakin apabila lapangan dan anggaran di dalam penelitian itu terbuka maka semakin banyak yang berkeinginan melakukan riset, khususnya di bidang teknologi,” imbuh Watua Bidang Korinbang ini. ■ ann/sf



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto, Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso dan pejabat Setjen dan BK DPR RI bersama Prof Ujianto Singgih Prayitno dan Majelis Profesor Riset

Foto: Jaka



Foto bersama Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Anggota BURT DPR RI Rendy Affandy Lamadjido dan pejabat Setjen dan BK DPR RI, serta Wartawan Koordinatoriat Parlemen

## Press Gathering Tingkatkan Silaturahmi DPR dan Wartawan

**Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI kembali menyelenggarakan *Press Gathering* di tahun 2018 ini. Kegiatan yang berlangsung di Wisma Griya Sabha DPR RI, Kopo, Cisarua, Bogor ini diharapkan mampu meningkatkan silaturahmi dan persaudaraan antara Pimpinan dan Anggota DPR RI, serta pegawai Setjen dan BK DPR RI dengan seluruh wartawan yang tergabung dalam Koordinatoriat Wartawan Parlemen.**

cara menguatkan divisi teknologi, khususnya di Press Room DPR RI. Karena dengan cara tersebut bisa menerawangi efek teknologi bagi jurnalisme, agar menumbuhkan kode etik bagi jurnalis yang sehat.

“Kita harus melawan dominasi teknologi kalau bisa nanti di Press Room divisi teknologinya juga harus di-bikinkuat. Karena dengan cara tersebut bisa menerawangi efek teknologi bagi jurnalisme dan menumbuhkan kode etik bagi jurnalis yang sehat, karena sekarang banyak berita-berita hoaks yang bermunculan,” pesan legislator dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

*Press Gathering* Koordinatoriat Wartawan Parlemen ini juga turut dihadiri Sekjen DPR RI Indra Iskandar, Deputi Persidangan Damayanti, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Y.O.I Tahapahari, Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial Muhammad Djazuli, jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen dan BK DPR RI, serta diikuti oleh 148 Wartawan Koordinatoriat Parlemen. ■ tn/sf

Kegiatan yang resmi dibuka oleh Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dan dihadiri Anggota BURT DPR RI Rendy Affandy Lamadjido, serta pejabat di lingkungan Setjen dan BK DPR RI ini berlangsung dengan meriah dan diakhiri dengan foto bersama serta pemilihan Ketua Press Room (Media Center) DPR RI yang baru. Wartawan yang bertindak sebagai peserta pun menikmati kegiatan dengan penuh rasa persaudaraan.

Dalam sambutannya di hadapan ratusan peserta *Press Gathering*, Fahri menjelaskan dalam kode demokrasi, pers yang kuat menjadi hal yang wajib, sehingga tidak terjebak kepada penguasa pemodal, dan harus berbasis kepada

narasumber, karena jurnalis mempunyai peran penting bagi Indonesia dan demokrasi Indonesia.

“Jurnalis harus mempunyai *roadmap* yang jelas karena jurnalis mempunyai peran penting dalam sistem demokrasi,” papar Pimpinan DPR RI Koordinatoriat Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu saat membuka acara *Press Gathering* Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Wisma Griya Sabha Kopo, Cisarua, Bogor, Jumat (24/11).

Fahri mengatakan, dimasa sekarang dominasi teknologi sudah semakin kuat, sehingga banyak bermunculan berita-berita yang tidak benar dan bohong (hoaks), untuk itu harus dilawan dengan



Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menghadiri peluncuran *website* “Sistem Data Dan Informasi Penelitian” dan buku “3 Tahun Badan Keahlian Bekerja Untuk DPR RI” oleh Badan Keahlian DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/11). Foto: Jaka/od



Tim Kunjungan Lapangan Komisi VII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir menggelar sidak ke PT. Jakarta Cakratunggal Steel Millss, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Kamis (29/11). Foto: Geraldie/od



Sekjen DPR RI Indra Iskandar memotong tumpeng saat memperingati HUT ke-47 KORPRI yang diikuti oleh seluruh pejabat dan karyawan di lingkungan Setjen dan Badan Keahlian DPR RI, Kamis (29/11). Foto: Azka/hr